

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemberhentian Abdurrahman Wahid lebih didorong oleh faktor politik daripada landasan hukum yang kuat. Meskipun mekanisme *impeachment* diatur dalam ketetapan MPR, keputusan DPR untuk menjatuhkan memorandum terhadap Gus Dur dipandang lebih sebagai maneuver politik daripada tindakan berdasarkan hukum. Kasus yang dikaitkan dengan Gus Dur, seperti skandal *Buloggate* dan *Bruneigate*, dijadikan alasan utama untuk menggulirkan *impeachment*, meskipun hasil penyelidikan tidak memberikan bukti kuat tentang keterlibatan langsungnya. Proses *impeachment* ini menunjukkan adanya ketegangan antara eksekutif dan legislatif serta indikasi bahwa kepentingan politik lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan dan konstitusionalitas.
2. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap *impeachment* Abdurrahman Wahid menekankan bahwa pemimpin dapat diberhentikan jika melanggar prinsip keadilan, hukum, dan syariat islam. Dalam islam, kepemimpinan bersifat amanah yang harus dijalankan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan umat. Dalam kasus Gus Dur, ia dianggap melanggar konstitusi, termasuk sumpah jabatan, TAP MPR tentang pemerintahan bersih, serta kebijakan yang dinilai kontroversial seperti pengangkatan kapolri tanpa persetujuan DPR. Meskipun *impeachment* dalam islam bisa dilakukan melalui musyawarah (*syura*), mekanisme yang terjadi dalam kasus Gus Dur lebih bernuansa politik daripada hukum. Oleh karena itu, proses *impeachment* ini dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah* yang mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam pengambilan keputusan politik.

B. Saran

1. Proses *impeachment* harus didasarkan pada bukti hukum yang kuat dan bukan sekadar kepentingan politik agar tetap adil dan konstitusional. Mekanisme *checks and balance* antara eksekutif dan legislatif perlu diperjelas untuk menghindari konflik kepentingan. Semua pihak harus memahami dan menghormati konstitusi guna menjaga stabilitas negara.
2. Prinsip *syura* dalam *fiqh siyasah* harus diterapkan untuk dapat memastikan keputusan politik agar tetap berlandaskan keadilan dan musyawarah. Selain itu, perbaikan budaya politik juga harus lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan perlu didorong agar demokrasi berjalan lebih sehat.